

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu organisasi dibentuk pasti dengan tujuan yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya organisasi akan menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, sehingga memiliki arah yang jelas mengenai sasaran yang ingin dicapai, apa yang harus dilakukan, bahkan memahami apa yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah mencapai visi dan misi yang diharapkan maka diperlukan adanya evaluasi

sebagai pertanggungjawaban. Sistem ini berlaku untuk semua bentuk organisasi bahkan organisasi pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Sistem pemerintahan desentralisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia menyebabkan adanya pendistribusian otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan, sehingga secara otomatis memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Sistem ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Pemerintah daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi ke UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Dengan adanya UU tersebut maka otonomi menjadi lebih luas dan dituntut adanya akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2002) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, kedua, pertanggungjawaban horisontal kepada masyarakat yang diwakilkan DPRD. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah ini merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dalam perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Melalui akuntabilitas pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Melalui laporan akuntabilitas masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kepercayaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik. Dengan kata lain apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas memiliki keterkaitan dengan anggaran pemerintah daerah. Anggaran dipemerintahan sangat penting, karena

berhubungan dengan fungsi dari pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kinerja pemerintah daerah akan diawasi oleh DPRD melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Menurut Kenis (1979) dalam Ehrmann dan Mochammad (2006) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran, salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran. Dalam penyusunan anggaran biasanya akan menerapkan proses partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran. Masing-masing satuan kerja akan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dalam instansi pemerintahan disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Di dalam RKPD memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang dijalankan. Maka didalam RKPD telah terdapat sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah dalam menentukan target anggaran, dimana nantinya target anggaran akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai dari pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas tetap diperlukan adanya pengendalian, sehingga pelaksanaan dari anggaran itu sendiri tidak melewati jalur yang seharusnya.

Pengendalian sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja yang diharapkan. Salah satunya adalah pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi merupakan pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi. Menurut Indraswari (2010), pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dengan menggunakan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan untuk melakukan kegiatan perencanaan, mengontrol, pengambilan keputusan, dan pelaporan keuangan yang lebih baik.

Simons (1987) menyatakan sistem pengendalian akuntansi meliputi ketatnya sasaran yang ada dalam anggaran, penggunaan sistem pengendalian kos, pelaporan yang

berkala, intensitas *monitoring* output, *scanning* lingkungan eksternal, penggunaan data ramalan dalam laporan pengendalian, sistem yang menghubungkan tujuan dengan hasil, formulasi dalam pemberian bonus berdasarkan pencapaian target anggaran, sistem pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan departemen dan individual, dan frekuensi perubahan sistem pengendalian. (Sukma, 2003)

Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Indraswari (2010) melalui penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Netty (2011) yang berjudul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama namun dengan lokasi objek penelitian yang berbeda. Peneliti ingin mengetahui apakah hasil penelitian akan sama

apabila dilakukan di tempat yang berbeda. Penelitian yang akan dilakukan yakni “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi,dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Untuk memenuhi akuntabilitas kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Palembang?
2. Apakah sistem pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Palembang?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Memberikan bahan masukan bagi instansi pemerintah daerah terutama Instansi pemerintah daerah kota Palembang dalam mencapai akuntabilitas perintah yang lebih baik.

2. Bagi Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan haknya dalam mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah.

3. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan, pemahaman, referensi, dan bahkan sebagai bahan pertimbangan serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang dari peneliti melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori dari berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Teori-teori dalam penelitian ini merupakan teori yang berkaitan dengan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan akuntabilitas kinerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik penentuan sampel, jenis data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan bab yang membahas secara menyeluruh pokok permasalahan dan menjelaskan hasil analisis dan pengolahan data yang terkumpul.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi instansi pemerintah daerah maupun bagi pihak lain.